

Executive Summary

**KESETARAAN GENDER
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASURUAN**

(Studi atas *Gender Mainstreaming* pada MI Wali Songo dan
SD Muhammadiyah Gempol, Pasuruan)



Oleh
Budi Ichwayudi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

LEMBAGA PENELITIAN

SURABAYA

2013

KESETARAAN GENDER
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASURUAN
(Studi atas *Gender Mainstreaming* pada MI Wali Songo dan
SD Muhammadiyah Gempol, Pasuruan)

A. Abstract

This study aimed to see mainstreaming gender agenda or Gender Mainstreaming (PUG) in Islamic educational institutions in Pasuruan. There are two basic educational institutions that become the object of study here, namely MI and SD Muhammadiyah Wali Songo in Gempol Pasuruan, where the first is a madrasah affiliated with Nahdlatul Ulama, the latter being under the auspices of the Muhammadiyah. PUG agenda here viewed from two domains : the foundation of education implementation process (vision, mission, policies and institutional) and applications in the field (gender relations in environmental portraits of teachers and gender relations in the curriculum).

The device is used as a knife theoretical analysis for the read data is gender theories, especially the patriarchal ideology. Patriarchal ideology is used as a reader to see the rift that occurred between theory and practice. Could be conceptually, PUG plan has been very good, but because patriarchal values still be the dominant value nirsadar incubate in each individual, the gender relations that occur still shows subordination of women.

Based on field research conducted by the authors resulted in interesting findings that gender equality in education in MI Wali Songo and outline the SD Muhammadiyah showed similarities that male dominance over women turned out to be very strong, despite the theoretical tries to keep implementation of equality and equity between men and women but in a practical level is not easy to implement. In terms of the curriculum in these two institutions appear strong dominance primarily when implementing Islamic material, for example, when held alert PHBI (Ceremonial Great Day of Islam) it stands to reason that that would convey the material is a man 's own material even more inclined about existence of men than women.

When entering the realm of the vision and mission in the two institutions have emerged that the vision and mission objectives to be achieved even at two educational institutions that is wanted to make the regeneration forward into personal faith and the master of science and expertise/skills that students can make "survive". But in actual use in the field found that regeneration was "stressing" over to the boys so that subordinate female students, but the reality on the ground shows that the more excel in academics are more inclined to women.

Gender relations in the field of education who also happens inequities, this is due to various factors including the factor leader / leaders or policy makers in the two institutions.

Key Words : Gender, SD 1 Muhammadiyah, MI Wali Songo, Education

B. Latar Belakang Masalah

Rasanya, arus perjuangan ke arah kesetaraan gender tidak mungkin lagi dibendung. Garis-Garis Besar Haluan Negara RI 1999 telah meletakkan keadilan gender sebagai salah satu kerangka pembangunan Indonesia. Secara lebih khusus, kebijakan mengenai *gender mainstreaming* / pengarusutamaan gender (PUG) diatur melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Inpres ini menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan nasional maupun program pembangunan daerah harus disusun dalam perspektif gender. Ini berarti bahwa keadilan dalam relasi gender menjadi kerangka bagi keseluruhan program pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Akan tetapi, kebijakan seringkali menjadi mandul jika berhadapan dengan tradisi. Ideologi patriarkhis yang menempatkan perempuan tidak lebih sebagai pelengkap laki-laki masih sangat kuat mengakar dalam tradisi Indonesia. Wajah budaya kita selama ini sangat kental dengan nilai-nilai patriarkhis. Peran perempuan hanya dibatasi semata-mata fungsi reproduktif. Fungsi reproduktif inilah yang selama ini dijadikan sebagai tolok ukur ideal peran perempuan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Ketika berbicara tentang tradisi, kita tidak bisa mengabaikan peran agama dalam pembentukan pandangan tradisi ini. Menurut Carmody,¹ agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun atau mengekalkan mitos tentang subordinasi perempuan di bawah laki-laki. Sangat mudah untuk menemukan interpretasi keagamaan yang melestarikan ketimpangan relasi gender.

Terkait dengan ini, maka adalah penting untuk melihat bagaimana relasi gender dalam lembaga pendidikan Islam di Pasuruan. Paling tidak, ada empat alasan mengapa ini menarik untuk diteliti. *Pertama*, lembaga pendidikan Islam secara umum memiliki dua komitmen utama: Sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan lembaga dakwah yang bertujuan untuk mempertahankan bangunan ajaran agama Islam. Lembaga pendidikan Islam memproduksi suatu gagasan keagamaan tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui proses pengajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan melihat fakta ini, bisa diasumsikan sangat kuat bahwa cara pandang keagamaan siswa sangat diwarnai oleh paham keagamaan yang diproduksi

¹ Denise Lardner Carmody, *Mythological Woman: Contemporary Reflections on Ancient Religious Stories* (New York: Crossroad, 1992).

oleh lembaga di mana dia belajar. Pada gilirannya, cara pandang keagamaan itulah yang akan berkembang di masyarakat.

Kedua, banyak diakui bahwa salah satu kendala perjuangan ke arah kesetaraan gender banyak mendapat tentangan dari kalangan agamawan. Banyak tradisi dan doktrin-doktrin keagamaan yang mensubordinasi perempuan. Maka, bisa dibayangkan bahwa budaya patriarkhis cukup kental di dalam proses pendidikan di lembaga berbasis agama. Kalau memang ini yang terjadi, strategi *gender mainstreaming* kurang lebih akan menemui hambatan yang sangat keras.

Ketiga, banyak guru lembaga pendidikan Islam yang menjadi da'i, baik profesional maupun semiprofessional, di tengah-tengah masyarakat. Jika paham keagamaan yang selama ini ditengarai sangat kental memproduksi dan mengekalkan ideolog patriarkhi menjadi kerangka utama dalam proses pendidikan pada lembaga pendidikan dasar di Pasuruan, maka agenda *gender mainstreaming* akan menuai kegagalan. Itu berarti bahwa seluruh sosialisasi keagamaan ke masyarakat akan tetap mengekalkan ideologi patriarkhis.

Keempat, berbicara tentang masyarakat Islam di Pasuruan, tentu tidak bisa diabaikan dua ormas Islam besar: NU dan Muhammadiyah. Sejauh kita berbicara tentang komunitas terdidik kedua ormas tersebut, maka itu berarti kita membicarakan tentang lembaga pendidikan yang dimiliki keduanya.

Dengan melihat posisi strategis lembaga pendidikan Islam di masyarakat Pasuruan, maka penting untuk melihat potret objektif relasi gender pada lembaga pendidikan Islam di Pasuruan. Potret ini penting sebagai dasar berpijak bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan sekolah Pasuruan. Studi ini dirancang untuk mencermati bagaimana konsep, realitas dan strategi Pengarusutamaan Gender di lingkungan sekolah dasar Islam di Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Secara umum, persoalan yang hendak diteliti adalah seberapa jauh Pengarusutamaan Gender terjadi pada sekolah dasar Islam di Pasuruan. Pengarusutamaan Gender ini akan dilihat dalam dua ranah: kebijakan lembaga (visi, misi, dan kebijakan kelembagaan), dan pelaksanaan kebijakan (relasi gender di lingkungan guru dan kurikulum).

Masalah umum di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Apakah acuan dasar yang menjadi pijakan bagi penyelenggaraan pendidikan pada MI Wali Songo dan SD Muhammadiyah telah mencerminkan sensitivitas gender?
2. Bagaimana relasi gender di lingkungan guru?
3. Bagaimana potret relasi gender dalam kurikulum yang diajarkan ke siswa?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengarusutamaan Gender di lingkungan sekolah dasar Islam di Pasuruan. Untuk itu, maka secara rinci studi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Acuan dasar yang menjadi pijakan bagi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dasar Islam di Pasuruan.
2. Proses penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dasar Islam di Pasuruan dilihat dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender (relasi gender di lingkungan guru dan kurikulum).

E. Metode

Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah segala informasi yang terkait dengan masalah relasi gender serta relitas *gender mainstreaming* pada MI Wali Songo dan SD Muhammadiyah di Pasuruan, mulai dari landasan (visi, misi serta berbagai kebijakan lain), kondisi relasi gender yang merupakan aplikasi dari landasan tersebut (relasi gender di lingkungan guru serta potret relasi gender di dalam kurikulum) Sementara, data sekunder pada prinsipnya adalah mencakup data dokumenter/statistik maupun informasi yang menopang data primer.

Sumber data untuk mendapatkan data-data tersebut terbagi menjadi dua: sumber data manusia dan non-manusia. Sumber data manusia terdiri atas jajaran guru dan pimpinan lembaga. Sumber data manusia ini digunakan untuk mendapatkan data-data primer, yaitu persepsi, sikap, dan pengalaman para pejabat dan pimpinan, tentang visi dan misi, serta wacana dan kebijakan di bidang *gender mainstreaming*. Termasuk data primer yang dihasilkan dari sumber data manusia

adalah data observasional tentang dinamika relasi gender dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

Sumber data non-manusia terdiri atas dokumentasi dan/atau statistik. Sumber data non-manusia digunakan untuk mendapatkan data-data primer, yaitu segala peraturan perundang-undangan serta segala bentuk keputusan dan kebijakan di lingkungan dua lembaga pendidikan tersebut. Termasuk data primer yang dihasilkan di sini adalah distribusi pegawai-guru menurut variable latar belakang pendidikan, karir kerja (fungsional dan struktural), dan jenis kelamin.

Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada jenis data di atas, maka data-data dapat dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan:

- a. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menggali data-data dokumen, termasuk data-data statistik, seperti visi, misi, peraturan perundang-undangan, dan berbagai surat keputusan yang menyangkut kebijakan kelembagaan. Termasuk data yang dihasilkan dari teknik ini adalah berbagai kondisi pegawai, guru, dan siswa.
- b. Wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk menggali data persepsi, sikap, dan pengalaman pimpinan, guru, serta siswa tentang visi dan misi, serta wacana dan kebijakan di bidang *gender mainstreaming*.
- c. Observasi. Teknik ini digunakan untuk menggali data-data tentang relasi gender dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Data ini meliputi relasi gender dalam proses belajar-mengajar dan interaksi secara umum di lingkungan sekolah.

Analisis Data

Sekalipun melibatkan beberapa lembaga, penelitian ini tidak berpretensi untuk melakukan analisis komparatif. Sebagaimana saran Rossaria dan Shaleh untuk melakukan analisis PUG di lembaga pendidikan melalui dua arah, analisis institusional dan individual,² maka penelitian ini juga menggunakan dua metode analisis tersebut. Model analisis institusional digunakan untuk memotret realitas pelaksanaan *gender mainstreaming* serta proyeksi ke depan. Analisis institusional ini didukung dengan analisis individual yang berkaitan dengan pengalaman tentang

² Eri Rossatria & Abdurrahman Shaleh, "Gender Mainstreaming," dalam Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah & McGill Project/IISEP, 2003), 254.

relasi gender yang ada di lembaga yang bersangkutan. Semua data akan dianalisis secara deskriptif untuk menampilkan kondisi objektif Pengarusutamaan Gender di masing-masing lembaga.

Sebagaimana sifat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu **deskriptif-naratif**. Dengan kata lain, semua data dianalisis secara deskriptif untuk menampilkan realitas PUG di tingkat kelembagaan masing-masing lembaga yang diteliti.

F. Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan

1. Kesetaraan dan Keadilan

Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat, terlebih perempuan yang selalu mendapat perlakuan diskriminatif, harus dikikis karena bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan serta bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah seimbang, tidak ada yang lebih sempurna di mata Tuhan kecuali ketakwaannya.

Penggambaran keseimbangan laki-laki dan perempuan juga diperlihatkan oleh Sachiko Murata yang memandang keseimbangan itu mengacu pada dualitas Taoisme yang saling menyatu.³ Dualitas Taoisme terdapat kesamaan konsep dengan Islam yaitu keagungan Tuhan dengan keindahan-nya. Yin-Yang merupakan dualitas pada keseimbangan. *Yang* memberi makna yang identik dengan sifat keagungannya, yakni Jalal, Qahr ; sedangkan *Yin* identik dengan sifat keindahan (Jamal, Luthf, rahmah). Dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa feminitas dan maskulinitas ada pada manusia dan masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Sifat feminin dengan ciri lemah lembut dan menyerah adalah positif ketika manusia pada posisi di hadapan Tuhan, sedangkan sifat maskulin yang positif adalah untuk melawan dan mengalahkan nafsu amarah menuju nafsu muthmainah dan dapat mengontrol dirinya.⁴

Kesetaraan juga diberlakukan dalam sektor ekonomi. Dalam pasal 3 perjanjian tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 1966, dinyatakan bahwa adanya persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam pekerjaan.

³ Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. terj. Rahmani Astuti dan NS Nasrullah. (Mizan : Bandung , 1999).

⁴ Ibid.

Konvensi Internasional dalam kasus diskriminasi terhadap perempuan juga telah diantisipasi dalam Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan (*the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) disahkan pada tahun 1979 dan berlaku secara internasional pada 17 Juli 1980.⁵ Konvensi tersebut lahir dari suatu kesadaran bahwa rumusan-rumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya mengkoordinir kepentingan perempuan dan melindunginya dari berbagai diskriminasi. Dalam pasal 5 dalam konvensi tersebut yang meminta pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk memodifikasi pola tingkah laku sosial dan budaya perempuan dan laki-laki guna mencapai penghapusan kebiasaan dan semua praktik yang didasarkan pada pemikiran inferioritas dan superioritas (kekurangan dan kelebihan) kedua jenis kelamin atau pada stereotipe untuk perempuan dan laki-laki, maupun hukum nasional yang menjadi dasar penghapusan diskriminasi yang mensubordinat perempuan perlu dilaksanakan sebagai upaya pencegahan diskriminasi terhadap hak ekonomi perempuan khususnya dalam sektor pekerjaan.⁶

Dalam Islam bekerja merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan berusaha apabila ia ingin berbuat dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah.⁷ Sebagai agama yang diyakini memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Islam tidak pernah menelantarkan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan, baik pekerjaan di rumah maupun luar rumah, baik di ranah publik maupun domestik. Pekerja perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penanggung kewajiban, baik perusahaan maupun oleh majikan. Jika hak-hak ini dipenuhi, maka besar kemungkinan persoalan antar buruh dan majikan atau perusahaan dapat diminimalisir. Dengan dipenuhinya hak-hak buruh atau pekerja, berarti telah menempatkan manusia sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.

Hak yang paling mendasar dari buruh atau pekerja adalah hak atas upah. Hak ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun

⁵ Lihat dalam Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional" dalam Din Wakhid (Ed.). *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan* (Jakarta: PPIM dan British Embassy, 2007).

⁶ Mukherjee, Nilanjana *Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencarian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. (Kerjasama Departemen Bantuan Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, 2002)

⁷ Lebih lanjut silahkan dilihat dalam Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, 2003)

perempuan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan perbedaan. Dalam teks-teks hadist tentang upah telah disebutkan betapa hak pekerja atas upah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda dan haram untuk disia-siakan. Pelakunya akan digolongkan sebagai musuh Allah kelak di hari kiamat.⁸

Kewajiban adanya perlindungan untuk perempuan dalam Islam bertujuan agar perempuan tetap dapat melakukan kerja-kerja sosial dengan aman tanpa gangguan, dan juga pada wilayah sosial ekonomi ketika perempuan menjadi buruh atau pekerja. Sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah:233, “.....*Seseorang itu tidak (boleh) dibebani dengan sesuatu di atas kemampuannya*”. Dalam hal perlindungan terhadap buruh perempuan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin mengemukakan suatu pernyataan yang menarik : “Pekerja adalah suatu hal yang dihormati. Di dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Hak seorang buruh adalah mengambil imbalannya itu sesuai dengan pekerjaannya”. Hak-hak buruh atau pekerja harus dipenuhi oleh majikan atau perusahaan agar mereka memiliki keleluasaan bekerja secara maksimal dan berdaya guna.⁹ Pemenuhan hak-hak dasar adalah imbalan wajib yang harus diterima seorang buruh. Bekerja adalah kehormatan, mempekerjakan orang dan memberi upah adalah upaya untuk melestarikan kehormatan tersebut.

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan meminta upah bila menyusui anaknya, kecuali air susu hari pertama yang merupakan kewajiban perempuan memberikan kepada anaknya karena mengandung kolostrum yang baik untuk meningkatkan imunitas bayi yang baru lahir. Memang ini tidak secara langsung Islam mengatakan bahwa mengajarkan hubungan ibu dan bayinya dihitung dengan uang, akan tetapi adalah menunjukkan penghargaan pada jerih payah ibu. Akhirnya berbagai jalan dapat ditempuh untuk

⁸ Lihat dalam Yanggo Tahido, Huzaimah.. “*Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan*” dalam Dadang S. Anshori (Ed.). *Membincang Feminisme. Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

⁹ Lebih lanjut lihat dalam Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “*Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional*” dalam Din Wakhid (Ed.). *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*. (Jakarta: PPIM dan British Embassy, 2007).

memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.¹⁰

2. Analisis Gender Mainstreaming Di 2 (Dua) Lembaga Pendidikan Islam Gempol Pasuruan

Berdasarkan paparan teori dan deskripsi penelitian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mencoba untuk menganalisis teori yang ada dan realitasnya berdasarkan observasi di lapangan maka penulis menjumpai beberapa hal sebagai berikut :

a. SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan

Untuk mengukur bagaimana kedudukan / eksistensi Gender Mainstreaming yang terdapat di SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan ternyata dalam pelaksanaannya memang masih terdapat sisi-sisi yang masih dianggap bahwa posisi laki-laki dalam proses pembelajaran dan pendidikan di SD Muhammadiyah masih muncul ketidaksetaraan dan keadilan meskipun berdasarkan observasi penulis terlihat ditutup-tutupi.

Bila dilihat dari perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan sebenarnya mulai muncul bahwa jumlah tenaga guru perempuan di SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan mulai menunjukkan peranan dan kiprahnya di dunia pendidikan yaitu lebih banyak bila dibandingkan guru laki-laki yaitu Guru Laki-laki berjumlah 4 orang, Sedangkan guru perempuan berjumlah 5 orang tetapi dalam pelaksanaannya ketika pemilihan Kepala Sekolah ternyata dominasi laki-laki masih menunjukkan eksistensinya bila dibanding Guru perempuan, sehingga kepala sekolah yang dipilih adalah seorang laki-laki yaitu Bapak Riyono yang masa baktinya mulai 2008 – 2014, hal ini ternyata sangat berbeda bila pada waktu sebelumnya. Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa sebelumnya kepala sekolah dijabat oleh seorang perempuan, tetapi dalam perkembangannya ketika terjadi pemilihan ternyata sosok kepala sekolah perempuan yang dulu merasa lebih baik kepala sekolah dipimpin seorang laki-laki karena anggapan di masyarakat laki-laki lebih baik dan unggul dalam segala bidang, padahal kenyataan di lapangan belum

¹⁰ Murti M.S., Krisni. dalam Jurnal Perempuan No 44. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Patimah. 2003. *“Dinamika Ekonomi Perempuan dalam Industri Kecil dan Menengah”* dalam Jurnal Equalita. Vol. 3. No. 2. Juni 2003.

ada kepastian bila kepala sekolah dijabat seorang laki-laki maka sekolah akan lebih maju dan sukses.

Ketika menentukan visi dan misi pendidikan maka yang berperan penting dalam perumusannya juga lebih dominan visi dan misi dari para guru laki-laki bila dibanding dengan guru perempuan bahkan rumusan visi dengan secara jelas mencantumkan seorang kata-kata seorang "muslim" dan bukan "muslimah", visi tersebut adalah sebagai berikut : *"Melahirkan Manusia **Muslim**, Berakhlaq Mulia, Cakap, Percaya Diri Sendiri serta Memiliki Aqidah Islamiyah yang Kuat dan Istiqomah"*.

Adapun misi yang ingin diciptakan oleh SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan aqidah Islam yang kuat
2. Membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari
3. Membiasakan berfikir rasional
4. Memberikan wadah keratifitas siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Menumbuhkan jiwa seni
6. Menumbuhkan ketrampilan dan pengetahuan
7. Memotivasi pengembangan skill siswa
8. Menumbuhkan budaya mandiri
9. Meningkatkan prestasi di segala bidang
10. Meningkatkan Kualitas SDM Pendidik
11. Membina Kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lembaga
12. Membina hubungan intensif dengan pihak orang tua atau wali murid

Dalam prakteknya dilapangan berdasarkan observasi penulis maka ditemukan bahwa cara mewujudkan misi yang tercantum diatas ternyata lebih menekankan pada segi Gender yaitu pihak murid laki-laki untuk di didik kepemimpinan dan leadership agar seorang siswa laki-laki mempunyai kemampuan yang lebih bila dibanding siswa perempuan, sehingga dominasi ini semakin jelas ketika praktek adzan ataupun menjadi imam sholat maka kedudukan siswa laki-laki lebih mendominasi pada kegiatan tersebut. Meskipun demikian siswa perempuan sebenarnya juga diberikan ruang untuk mengembangkan jari dirinya namun kesempatan yang didapat siswa perempuan sifatnya terbatas bila dibanding siswa laki-laki.

Ketika melihat dalam hal kurikulum pendidikan maka ditemukan dilapangan bahwa relasi Gender antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan meskipun tidak mencolok tetapi penerapan kurikulum tersebut muncul perbedaan. Salah satu contoh ketika penerapan kurikulum ekstrakurikuler yaitu peringatan hari besar Islam (PHBI). Dalam pelaksanaannya relasi Gender antara laki-laki dan perempuan muncul ketika yang menjadi pembicara PHBI yaitu guru laki-laki lebih dominan bila dibanding guru perempuan dalam memberikan "mauidhah". Ketika memotivasi siswa untuk maju kedepan maka keberanian untuk tampil didominasi oleh siswa laki-laki daripada perempuan.

Dengan demikian relasi Gender dalam dunia pendidikan khususnya di SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan diakui atau tidak diakui ternyata dominasi laki-laki atas perempuan tetap menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan, sehingga meskipun prestasi belajar banyak didominasi oleh siswa perempuan tetapi dalam pelaksanaan eksistensi jati dirinya ternyata laki-laki lebih mendominasi bila dibandingkan dengan perempuan, baik ditinjau dari Guru, Siswa, kurikulum dan manajemen pendidikannya.

b. MI (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo Gempol Pasuruan

Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Gempol Pasuruan dalam pelaksanaan relasi gender di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan observasi penulis di lapangan ternyata masih ada meskipun agak ditutup-tutupi. Hal ini nampak sekali ketika penulis mencoba untuk menanyakan eksistensi guru perempuan bila dibanding dengan guru laki-laki. Pertama ketika penulis mendatangi lembaga pendidikan tersebut di Gempol Pasuruan maka guru perempuan cenderung untuk menutup diri dalam menyambut kedatangan kami bahkan guru perempuan banyak yang lebih menyarankan untuk menanyakan berbagai informasi tentang lembaga pendidikan MI Wali Songo kepada guru laki-laki saja.

Ketika bertemu dengan Kepala Sekolah dan menanyakan berbagai hal dan berdasarkan observasi penulis maka dapat dianalisis bahwa relasi gender antara guru laki-laki dan perempuan sebenarnya tampak sangat kasat mata, tetapi kepala sekolah mencoba untuk menutup-nutupinya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam dunia pendidikan yang mencakup masalah kurikulum, penentuan visi dan misi serta tujuan sekolah justru yang lebih menentukan semua itu adalah guru laki-laki.

Eksistensi guru perempuan hanya dipandang sebagai "second opinion" dalam proses pembelajaran dan penerapan kurikulum.

Berbagai kegiatan misalnya ketika PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) ternyata didominasi guru laki-laki lebih terlihat ketika memberikan "Tausyiah" tentang berbagai macam kegiatan maka figur "Kiyai" yang sangat "sakral" di dunia NU (Nahdlatul Ulama) maka justru akan menunjukkan eksistensinya bila dibandingkan dengan figur Bu "Nyai" (istri Kyai). Bahkan setiap peringatan PHBI maka dipastikan yang memberikan "Tausyiah" adalah seorang laki-laki, karena kedudukan laki-laki sangat tinggi sekali bila dibandingkan kedudukan perempuan baik dalam pendidikan, pekerjaan dan berbagai bidang lainnya.

Dalam menentukan visi dan misi MI Wali Songo maka akan dijumpai bahwa visi yang telah dirumuskannya adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Peserta didik yang cerdas, kreatif, aktif, dan berakhlakul karimah", hal ini mengindikasikan bahwa seorang siswa harus mempunyai jiwa yang kreatif, cerdas aktif dan yang penting adalah berakhlakul karimah. Akhlakul karimah disini di pandang adalah memiliki perilaku yang baik yaitu harus di jiwai dengan semangat hormat dan menghormati. Ternyata pada penerapannya penghormatan kepada laki-laki dan perempuan masih belum nampak karena kedudukan laki-laki bila dibandingkan perempuan maka lebih unggul dan mulia seorang laki-laki hal ini di dasarkan pada ayat al-Qur'an yang mengemukakan bahwa "Laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan".

Teologi yang bersumber dari al-Qur'an inilah yang sangat terasa kental di lingkungan MI Wali Songo, oleh karena itu sepanjang sejarah kepemimpinan MI Wali Songo akan selalu dipimpin oleh seorang laki-laki, bahkan ketika pihak sekolah mencoba untuk membuka penerimaan guru baru maka meskipun pihak sekolah telah menentukan pilihan namun pada akhirnya pihak yayasanlah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi guru di MI Wali Songo. Pihak Yayasan ternyata dalam menentukan guru akan melihat dulu jenis kelaminnya, background organisasinya yaitu harus orang NU, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi Gender Mainstreaming tidak menjadi pertimbangan utama tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana kuatnya relasi kepentingan dengan pihak yayasan tersebut.

Penulis menemukan keunikan tersendiri ketika meneliti lembaga Pendidikan MI Wali Songo ini yaitu terdapat seseorang yang sangat dimuliakan dan dihormati serta menjadi menentukan kebijakan dalam setiap keputusan yang akan diambil

dalam lembaga Pendidikan MI Wali Songo ini yaitu terdapat satu orang perempuan yang dihormati karena beliau merupakan istri dari salah seorang pendiri MI Wali Songo. Sehingga ucapan/perkataan dan perilaku beliau sangat dihormati dan di junjung tinggi, beliau adalah Hj. Munawaroh yang lahir di Pasuruan 8 Oktober 1949. Bila dihubungkan dengan teori Gender maka hal ini bukan berarti kedudukan perempuan di MI Wali Songo sangat dihormati tetapi kebetulan saja suaminya yang merupakan salah seorang tokoh di MI Wali Songo sangat dimuliakan maka istrinya inipun menjadi orang yang dimuliakan juga.

Sebenarnya dalam memandang kedudukan Gender Mainstreaming di lingkungan pendidikan MI Wali Songo harus secara proporsional dan rasional sehingga dalam aplikasinya dilapangan utamanya di dunia pendidikan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah di tetapkan agar lebih proporsional dalam pengambilan sebuah kebijakan yang tidak boleh di dasarkan hak privilege (hak istimewa) dari orang-orang yang dimuliakan, atau berdasarkan ke"tokoh"an, atau kekayaan ataupun yang lainnya tetapi berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan berbagai kriteria-kriteria yang tepat agar dunia pendidikan kedepan lebih maju dan berkembang serta mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya.

G. Simpulan

Berdasarkan paparan penelitian dan deskripsi dari laporan penelitian serta analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga pendidikan SD Muhammadiyah 1 Gempol Sidoarjo dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo telah berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga tersebut dengan berusaha mencerminkan sensitivitas gender dalam dunia pendidikan namun dalam pelaksanaannya belum secara sempurna untuk menerapkannya hal ini karena terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghalang terhadap sensitivitas gender tersebut, diantara faktor-faktor tersebut adalah anggapan umum di masyarakat bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan yang dipandang tetap relevan di masyarakat sehingga eksistensi perempuan menjadi ter subordinasi hampir dalam setiap aspek di dunia pendidikan.
2. Relasi gender di lingkungan guru yaitu antara guru laki-laki dan perempuan tetap tidak dapat di hilangkan, hal ini hampir selalu terjadi dalam setiap aktivitas di dunia pendidikan utamanya relasi antar guru. Guru laki-laki selalu mendapat tempat yang lebih terhormat dan dimulyakan bahkan dalam setiap kegiatan misalnya rapat-rapat guru di lingkungan sekolah maka pendapat, saran, masukan dan kritikan dari guru-guru laki-laki lebih mendapatkan tempat dan menjadi kebijakan bila dibandingkan dengan guru perempuan dalam dunia pendidikan, bahkan ketika mengadakan rencana aksi dari keputusan rapat guru maka guru laki-laki yang dipandang pantas untuk menjadi pemimpin/leader dalam kegiatan tersebut.
3. Potret relasi gender dalam kurikulum yang diajarkan kepada siswa sebenarnya mulai ada harapan untuk menunjukkan keberpihakan kepada semua jenis kelamin, tetapi dalam prakteknya dilapangan selalu muncul keberpihakan dan dominasi laki-laki bila dibandingkan dengan perempuan. Terutama kurikulum agama Islam yang justru menunjukkan dominasi laki-laki lebih menonjol bila dibandingkan dengan perempuan, salah satu contoh misalnya ketika menjadi hafalan-hafalan surat al-Qur'an, ketika adzan, ketika menjadi Imam bahkan ketika proses LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) maka akan terlihat jelas relasi gender tidak akan seimbang, karena selalu terjadi subordinasi perempuan atas laki-laki, sehingga laki-laki selalu dominan dalam aktifitas di dunia pendidikan.

SARAN-SARAN

1. Sudah seharusnya pada zaman sekarang ini tidak perlu diperdebatkan lagi relasi gender di dunia pendidikan, karena sekarang justru yang lebih di kedepankan adalah kompetensi, kapabilitas dan akseptabilitas yang harus lebih ditonjolkan dalam setiap aktifitas dunia pendidikan.
2. Dalam dunia pendidikan harus dapat memberikan contoh teladan yang baik dan memberikan ruang gerak yang sama terhadap semua orang dengan tidak membedakan identitas gender, karena dalam pandangan Allah semua manusia itu sama tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang cantik atau jelek, justru menurut pandangan Allah SWT yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan manusia tersebut kepada Allah SWT.
3. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk mengatasi kesenjangan di dunia pendidikan utamanya relasi gender laki-laki terhadap perempuan agar tercipta suatu kondisi dan semangat untuk bersaing secara sehat dalam dunia pendidikan serta terciptanya kesetaraan dan keadilan, karena pada hakekatnya ajaran Agama Islam tidak pernah membelenggu pihak perempuan justru menempatkannya di tempat yang mulia, sehingga doktrin Agama sebagai justifikasi terhadap dominasi laki-laki perlu untuk di tinjau ulang.